

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan global seperti tingkat kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan krisis keuangan, isu pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada integrasi pembangunan ekonomi dan perlindungan merupakan tantangan berat bagi para pengambil kebijakan di setiap negara. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan (A.H, 2016).

Konsep pembangunan yang berkelanjutan yang telah disepakati pada tahun 1987 oleh *The Brundtland Commission of The United Nations*. Dalam laporannya yang berjudul “*Our Common Future*” nampak keprihatinan dunia akan degradasi lingkungan akibat pembangunan yang diungkapkan sebagai berikut: “kecenderungan pembangunan masa kini mengakibatkan orang miskin semakin banyak dan mudah terserang penyakit, serta merusak lingkungan. Bagaimana pembangunan yang demikian ini dapat melayani dunia diabad mendatang yang berpenduduk dua kali lipat dan tetap menyandarkan pada lingkungan hidup yang sama ? “ (Pertiwi, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta Implementasi Sustainable Development di Indonesia meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Jadi tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus diupayakan dengan keberlanjutan (Fauzi & Oxtavianus, 2014).

Definisi di atas menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan mempertimbangkan pola pembangunan dan pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumberdaya alam yang dimanfaatkan pada kegiatan pembangunan serta kendala peningkatan kesejahteraan bagi generasi masa kini dan masa mendatang (Pertiwi, 2021). Hakekatnya pembangunan ekonomi perlu mengandalkan kemajuan ilmu sains dan teknologi untuk bisa menaikkan nilai tambah dari sumber daya alam. Dalam kerangka ini ikhtiar menaikkan produktifitas manusia dan masyarakat menjadi penting agar produksi bisa berlangsung dengan penggunaan sumber daya alam yang semakin sedikit. Pola pembangunan harus juga memperhitungkan dampak pengelolaan sumber daya alam agar tidak melampaui ambang batas keberlanjutannya. Begitu pula agar dampak pengelolaan sumber daya alam tidak mengurangi keberlanjutan fungsi alam (Salim, 2021).

Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan aturan RPJMN 2020 – 2024 dimana pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek yang bertujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Negara di dunia keseluruhannya masih berjuang melalui upaya penanganan Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Melandanya pandemi Covid-19 di berbagai negara di seluruh dunia telah menyadarkan akan pentingnya aspek lingkungan dan sosial dalam aktivitas ekonomi. Hal ini membuat situasi pandemi

menjadi momentum yang tepat untuk menerapkan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pandemi menjadi momentum untuk mengevaluasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam seluruh aktivitas ekonomi. Pandemi yang ada saat ini tidak boleh menurunkan semangat untuk mewujudkan target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mendorong pembangunan berkelanjutan salah satunya melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. UU Cipta Kerja telah menyempurnakan lebih dari 80 UU untuk mendorong kemudahan berusaha dengan tetap mengedepankan aspek keberlanjutan atau kelestarian lingkungan. Khusus untuk lingkungan hidup dan kehutanan terdapat 3 UU yang disempurnakan yaitu UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. (<https://www.ekon.go.id/>)

Pemikiran tentang dimensi pembangunan juga terus berkembang. Namun pemikiran yang paling mengemuka dan dipergunakan oleh banyak pihak adalah pembangunan berkelanjutan yang mengusung tiga dimensi, ekonomi, sosial dan lingkungan. Walau mengusung dimensi yang sama, pandangan tentang keterkaitan antar ketiga dimensi tersebut ternyata juga cukup bervariasi (Suharyani & Djumarno, 2023).

Indonesia sudah memiliki komitmen untuk menerapkan pola pembangunan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan diratifikasinya *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs adalah 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh seluruh negara anggota PBB. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam menerapkan pola pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan adalah perubahan iklim. Indonesia adalah negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Hal ini dapat menyebabkan bencana alam, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Perubahan iklim juga dapat merusak lingkungan, seperti hutan dan laut. Indonesia harus fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan. Indonesia juga harus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan energi terbarukan, konservasi energi, dan pengelolaan limbah yang lebih baik (<https://id.quora.com>).

Konflik di wilayah Sub-Saharan Africa (SSA), menurut catatan Bank Dunia tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di SSA diproyeksinya sebesar 2,5% di tahun 2023 dibanding 3,6% di tahun 2022, salah satunya diakibatkan oleh konflik. *Global Sustainable Development Report* (GSDR, 2023) mencatat konflik menghambat pembangunan berkelanjutan di banyak negara seperti Ukraina, Afganistan, Ethiopia, Venezuela, dan wilayah Sahel. Tercatat sepanjang Maret – Mei 2022, sekitar 26,5 juta orang di wilayah Sahel mengalami krisis pangan dan nutrisi.

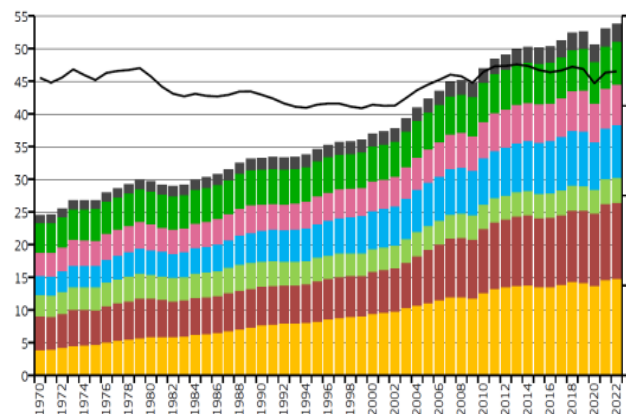
Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) atau SDGs, Tujuan 17 (SDG 17) yang berfokus pada isu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh menjadi dimensi tersendiri sebagai prasyarat (*enabler*) tercapainya pembangunan di tiga dimensi lainnya yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena itu, di Indonesia, pelaksanaan SDGs yang berarti juga pelaksanaan pembangunan, menempatkan dimensi perdamaian, keadilan, dan kelembagaan ini menjadi pilar yang mendapatkan perhatian tersendiri. (<https://sdgs.bappenas.go.id>)

Berjalannya waktu, banyak bisnis yang berkembang sesuai dengan permintaan pasar. Oleh karena itu, perkembangan bisnis saat ini diiringi dengan adanya isu lingkungan hidup yang muncul, salah satu isu yang populer adalah perubahan iklim di berbagai negara. Perubahan iklim merupakan masalah yang sangat sering terjadi yang disebabkan karena adanya pemanasan global (*global warming*) yang terus meningkat. *Global warming* mengakibatkan banyaknya bencana alam terjadi di berbagai belahan bumi, seperti kekeringan, gagal panen, topan dan badai yang mengakibatkan naiknya suhu bumi secara menyeluruh. *Global warming* disebabkan oleh meningkatnya jumlah emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya (GRK) seperti *karbondioksida*, *metana*, *chlorofluorocarbons* (CFC), dan *dinitrooksida*.

Gas rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global karna peningkatan jumlah senyawa GRK dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi. AGGI (*Annual Greenhouse Gas Index*) menggabungkan efek gas rumah kaca antropogenik utama dan membandingkannya dengan kondisi pada 1990, pada tahun 2021 AGGI akan mencapai peningkatan 49% efek rumah kaca dibandingkan tahun 1990 dimana atmosfer saat ini menyerap energi 3,22 watt per meter persegi permukaan bumi (Lindsey, 2021).

Perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan perusahaan lebih mudah dalam mendapatkan akses untuk terus berkembang, namun sayangnya, masih banyak perusahaan yang tidak peduli terhadap dampak lingkungan dan sosial dari usahanya karena hanya ingin memaksimalkan keuntungan (Meiyana & Aisyah, 2019). Salah satu dampak dari adanya aktivitas operasi perusahaan terhadap lingkungan adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca. Sehingga isu mengenai kerusakan lingkungan mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan.

Gambar 1.1
Emisi GRK Global Tahun 1970 – 2022



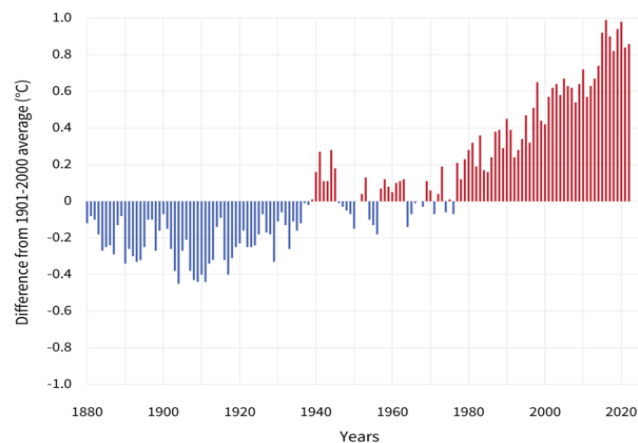
(Sumber: European Comiision)

Emisi gas rumah mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 mencapai tingkat 53,8 Gt CO₂e²⁷, yang berarti 1,4% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2,3% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Tahun 2022 menjadi tahun dengan jumlah emisi gas rumah kaca paling tinggi sejak tahun 1970.

Gas rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global karna peningkatan jumlah senyawa GRK dapat menyebabkan peningkatan suhu bumi. AGGI (*Annual Greenhouse Gas Index*) menggabungkan efek gas rumah kaca antropogenik utama dan membandingkannya dengan kondisi pada 1990, pada tahun 2021 AGGI akan mencapai peningkatan 49% efek rumah kaca dibandingkan tahun 1990 dimana atmosfer saat ini menyerap energi 3,22 watt per meter persegi permukaan bumi (Lindsey, 2022).

Pemanasan global adalah salah satu dampak lingkungan yang diabaikan oleh banyak perusahaan yang sedang menjadi isu politik dan bisnis di berbagai negara (Khairunisa & Pohan, 2022). Pemanasan global (*global warming*) merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer global (Pratama & Parinduri, 2019). Suhu bumi meningkat sebesar $0,08^{\circ}\text{C}$ per dekade sejak tahun 1880, sementara laju pemanasan meningkat dua kali lipat sebesar $0,18^{\circ}\text{C}$ per dekade sejak tahun 1981 (Lindsey & Dahlman, 2022).

Gambar 1.2
Rata-rata suhu Global

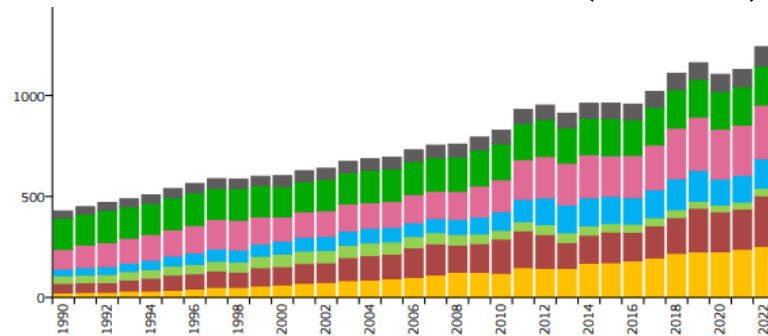


(Sumber: *climate.gov*)

Gambar diatas menjelaskan suhu bumi telah meningkat_rata-rata $0,14^{\circ}$ Fahrenheit ($0,08^{\circ}$ Celsius) per dekade sejak tahun 1880, atau totalnya sekitar 2° F. Laju pemanasan sejak tahun 1981 dua kali lebih cepat: $0,32^{\circ}$ F ($0,18^{\circ}$ C) per dekade. Tahun 2022 adalah tahun terpanas keenam yang pernah tercatat berdasarkan data suhu NOAA. Suhu permukaan pada tahun 2022 adalah $1,55^{\circ}$ F ($0,86^{\circ}$ Celsius) lebih

hangat dibandingkan rata-rata abad ke-20 sebesar 57,0 °F (13,9 °C) dan 1,90 °F (1,06 °C) lebih hangat dibandingkan periode praindustri pada tahun 1880-1900.

Gambar 1.3
Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia (1990 - 2022)



(Sumber: European Comiision)

Emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2022 merupakan paling tinggi sejak tahun 1990. Volume gas rumah kaca mencapai 1,24 gigaton setara karbon dioksida (Gt CO₂e) atau meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya (*year-on-year*). Persentase peningkatan tahunan ini paling besar di banding negara-negara lain (Crippa et al., 2023).

Paris Agretment menyatakan Indonesia memiliki komitmen untuk mengatasi perubahan iklim dengan membatasi peningkatan suhu global hingga 2°C dengan upaya lebih lanjut untuk membatasi peningkatan tersebut hinga 1,5°C. untuk mencapai target 1,5°C, emsis harus dikurangi sebesar 45% pada tahun 2030 dan mencapai *net-zero Emission* (NZE) pada tahun 2050.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Deforestasi merupakan kontributor utama emisi gas rumah kaca di Indonesia. *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia mengizinkan deforestasi yang substansial. Hal ini menghambat upaya untuk membatasi peningkatan suhu global. Selain itu, sektor energi, yang menyumbang lebih dari 70% emisi gas rumah kaca global, menghadapi tantangan besar dalam upaya pengurangan emisi. Ketergantungan Indonesia pada pertumbuhan industri dan penggunaan energi menambah kompleksitas ini. Hal lain yang tak kalah penting adalah kerentanan geografis Indonesia terhadap dampak perubahan iklim, seperti

kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem, membutuhkan strategi adaptasi yang kuat.

Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, pemerintah juga berkomitmen untuk menerapkan pembangunan rendah karbon. UU No. 7 Tahun 2021 diterbitkan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk mengatur pemungutan pajak karbon. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pajak karbon dikenakan pada barang atau kegiatan yang menghasilkan emisi karbon. Pengenaan pajak karbon bertujuan mengubah perilaku masyarakat dan industri untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah emisi karbon. Aturan tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mencapai *net zero emission* pada tahun 2050 (Pratama et al., 2022).

Pengungkapan informasi karbon merupakan respon perusahaan terhadap kebutuhan pemangku kepentingan akan informasi mengenai isu-isu lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon. Perusahaan mengungkapkan informasi strategis dan operasional melalui laporan tahunan, ESG, dan keberlanjutan untuk menunjukkan pemenuhan tanggung jawab pengurangan emisi karbon mereka. Selain itu, pengungkapan emisi karbon sangat penting untuk efisiensi operasi dan alokasi sumber daya perdagangan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon yang berkualitas tinggi dapat memitigasi asimetris informasi, sehingga meningkatkan nilai pengambilan keputusan dari informasi karbon (Liu & Jiayin, 2024).

Bursa Efek Indonesia telah meluncurkan indeks yang berisi perusahaan yang peduli perubahan iklim yang bernama Indeks IDXLQ45 *Low Carbon Leaders*. Indeks ini bertujuan untuk mengurangi eksposur intensitas emisi karbon atas portofolio sebesar minimal 50% dibandingkan dengan Indeks LQ45 sebagai *parent index*. Dengan adanya indeks tersebut para investor dapat mengetahui daftar perusahaan yang memiliki kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Kontribusi perusahaan terhadap pengurangan emisi karbon terdapat pada laporan keberlanjutan atau laporan tahunan perusahaan. Semakin banyak informasi yang diungkapkan akan semakin baik karena menunjukkan kepedulian perusahaan

terhadap perubahan iklim dan pemanasan global yang mana akan meningkatkan citra perusahaan di mata investor. Citra perusahaan yang buruk akan membuat investor enggan untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan tersebut.

Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dengan cara penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, hingga kegiatan pasca tambang.

Pengungkapan emisi karbon yang terdapat pada perusahaan pertambangan yaitu para pelaku usaha pertambangan menyadari bahwa jika batu bara merupakan penyumbang emisi karbondioksida atau gas rumah kaca yang cukup tinggi. Batu bara melepaskan 66% lebih banyak CO₂ per unit energi yang dihasilkan terutama yang berasal dari aktivitas pertambangan maupun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBI) Pandu Syahrir mengatakan bahwa Pertambangan Batu Bara dan PLTU berkontribusi hingga sepertiga dari total emisi karbon yang dihasilkan saat ini yang mencapai 1,263 giga ton. Menurutnya, perkembangan teknologi di sektor pertambangan batu bara dan PLTU memiliki peran penting untuk dapat berkontribusi dalam menekan jumlah emisi karbon misalnya seperti teknologi *carbon capture utilization storage*. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk diterapkan di lingkup sektor pertambangan. Seperti peralihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dari solar ke *biodiesel* B30 untuk operasional kegiatan tambang, PLTS atap untuk sumber energi listrik menggantikan genset serta teknologi *ultra supercritical* untuk meningkatkan efisiensi dan menekan polusi yang dihasilkan PLTU (Melja et al., 2023).

Sektor pertambangan akan menghadapi tekanan dari pemerintah, investor, dan masyarakat untuk mengurangi emisi. Pertambangan saat ini bertanggung jawab atas 4 hingga 7% emisi gas rumah kaca (GRK) secara global. Emisi CO₂ Cakupan 1 dan Cakupan 2 dari sektor tersebut (yang dikeluarkan melalui operasi pertambangan dan konsumsi listrik, masing-masing) berjumlah 1 %, dan emisi *metana buron* dari pertambangan batu bara diperkirakan sebesar 3 hingga 6%.

Sebagian besar emisi global 28% akan dianggap sebagai emisi Lingkup 3 (tidak langsung), termasuk pembakaran batu bara industri pertambangan baru saja mulai menetapkan sasaran pengurangan emisi. Sasaran yang diterbitkan oleh perusahaan pertambangan saat ini berkisar antara 0 hingga 30 persen pada tahun 2030, jauh di bawah sasaran Perjanjian Paris. Secara teori, tambang dapat sepenuhnya melakukan *dekarbonisasi* (kecuali *metana* yang mudah menguap) melalui efisiensi operasional, *elektrifikasi*, dan penggunaan energi terbarukan (Delevingne et al., 2020).

Peningkatan suhu bumi yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan karena emisi gas rumah kaca menyebabkan banyak perusahaan harus berkontribusi dalam pengurangan gas rumah kaca yang dihasilkan perusahaan tersebut. Salah satu perusahaan tersebut yaitu PT AKR Corporindo Tbk. PT AKR Corporindo Tbk merupakan salah satu perusahaan yang tercatat dalam Indeks IDXLQ45LCL yang merupakan indeks yang berisi perusahaan yang memiliki emisi karbon yang rendah. Dalam laporan keberlanjutan tahun 2022, perusahaan tersebut terus mendukung program transisi menuju ekonomi rendah karbon. Adapun program yang dilakukan perusahaan tersebut untuk menuju ekonomi rendah karbon tersebut melalui investasi pada proyek-proyek yang menunjang pengurangan emisi karbon seperti LNG, *biofuel*, panel surya atap, panel surya terapung dan kawasan industri hijau. PT AKR Corporindo juga mengadopsi *real-time digital control tower* dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk merencanakan operasi lebih baik dan mengurangi emisi karbon untuk operasi logistik AKR. Perusahaan tersebut juga terus meningkatkan pemakaian energi terbarukan dalam operasinya dan mempertahankan intensitas 7 emisi karbon yang dihasilkannya. Intensitas emisi PT AKR Corporindo Tbk tahun 2022 dilaporkan sebesar 0,036 ton Co2 per Rp juta Laba bruto, tidak mengalami perubahan dari intensitas emisi tahun lalu. Program-program yang dijalankan PT AKR Corporindo Tbk tersebut dinilai cukup berhasil karena dapat mempertahankan intensitas emisi karbon yang dihasilkan perusahaan pada tahun 2022.

Perusahaan sektor energi lainnya yang juga melaporkan emisi karbonnya yaitu PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang pertambangan batu bara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan batu bara. PTBA merupakan salah satu perusahaan yang mendukung target pencapaian nol emisi atau *net zero emission* pada tahun 2060. Pada tahun 2022 dengan total produksi mencapai 37,14 juta ton, maka total konsumsi energi tercatat sebesar 10,72 juta Gigajoule (GJ), naik dibanding tahun 2021 dengan konsumsi energi sebesar 7,19 juta GJ dan total produksi sebanyak 29,26 juta ton. Bertambahnya penggunaan energi otomatis berdampak pada bertambahnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan, terutama emisi gas rumah kaca (cakupan 1) langsung dari penggunaan bahan bakar minyak berbahan fosil, dan emisi gas rumah kaca (cakupan 2) tidak langsung dari penggunaan listrik. Emisi cakupan 1 tercatat sebesar 710.834 ton CO₂ e, naik dibanding tahun 2021 sebesar 468.216 ton CO₂ e. Adapun emisi cakupan 2 tidak langsung tahun 2022 sebesar 118.080 ton CO₂ e, naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 89.823 ton CO₂ e. Peningkatan emisi karbon yang dihasilkan PT Bukit Asam Tbk ini disebabkan karena peningkatan penggunaan BBM, penggunaan listrik dan penggunaan energi dalam kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan.

Asyari & Hernawati (2023) menyatakan apabila dilihat dari sudut pandang perusahaan, permasalahan ini dapat dijadikan inisiatif dalam hal pelaporan non akuntansi, yaitu tema-tema lingkungan dan sosial misalnya pengungkapan emisi karbon. Saat ini dalam permasalahan pengungkapan emisi karbon secara langsung maupun tidak langsung harus melibatkan akuntansi, sehingga dibutuhkan komitmen yang besar untuk dapat menekan pengaruh buruk terhadap lingkungan dan iklim. Pengungkapan informasi lingkungan perusahaan dipahami sebagai pendekatan yang masuk akal bagi perusahaan untuk mengintegrasikan kepedulian dan komitmen lingkungan mereka ke dalam tujuan, nilai, dan budaya mereka.

Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan

secara efektif selama periode tertentu (Rudianto, 2013). Kinerja perusahaan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilakukan.

Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan rasio *profitabilitas (ROA)* sebagai indikator pengukuran keberhasilan perusahaan. Rasio *profitabilitas* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, atau modal. Analisis *ROA* atau *Return On Asset* mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan. Analisis ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu dan bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa mendatang. (Hanafi & Halim, 2018).

Penggunaan rasio ini dikarenakan dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik teknis dan terkait dengan efisiensi perusahaan, dan semakin tinggi nilai *ROA* mengindikasikan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan yang semakin baik. Semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan, maka perusahaan mempunyai kemampuan secara finansial dalam memasukkan strategi pengurangan emisi karbon ke dalam strategi bisnisnya (Pratiwi, 2016).

Nastiti & Hardiningsih (2022) melakukan penelitian dengan judul Determasi pengungkapan emisi karbon penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur sub pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan *profitabilitas* yang diukur dengan *ROA* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Nurdiawansyah (2017) melakukan penelitian dengan judul Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan *profitabilitas* yang diukur dengan *ROA* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Nazir (2022) dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan, Kinerja Lingkungan, Sistem Manajemen Lingkungan,

Kepemilikan Manajerial Dan Reputasi KAP Terhadap *Carbon Emission Disclosure* penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur, pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2020. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROE tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Wirawan & Setijaningsih (2022) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengungkapan Emisi Karbon DiIndonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang waktu 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan *profitabilitas* yang diukur dengan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Yumnun & Nawangsari (2021) melakukan penelitian dengan judul Determinasi Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan DiIndonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan *nonfinancial* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2017 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan *profitabilitas* yang diukur dengan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan indikator ROA dan ROE masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga menimbulkan *research gap*.

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar yang diharapkan dapat memberikan lebih banyak pengungkapan karbon sukarela. Bahwa perusahaan yang lebih besar memungkinkan perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar biaya produksi informasi (mengumpulkan dan menghasilkan informasi) bagi pengguna laporan tahunan (Melja et al., 2023). Perusahaan publik yang berukuran besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah, kreditor, dan pemegang saham atau investor. Oleh sebab itu, perusahaan besar akan lebih cenderung mengungkapkan emisi karbon dalam laporan tahunan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (Sekarini & Setiadi, 2022).

Ukuran perusahaan adalah skala ukuran yang dilihat dari total aset suatu perusahaan atau organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Ukuran perusahaan diukur dengan *Logaritma natural* (Ln) dari rata-rata total aktiva (*total assets*) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu (Harahap, 2018).

Sekarini & Setiadi (2022) melakukan penelitian dengan judul pengaruh *leverage*, *profitabilitas*, ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Nastiti & Hardiningsih (2022) melakukan penelitian dengan judul Determasi pengungkapan emisi karbon. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur sub pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Rusdianti (2024) melakukan penelitian dengan judul Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Dengan *Profitabilitas* Sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2021. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Septriyawati & Anisah (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Media *Exposure*, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas* dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga menimbulkan *research gap*.

Dalam sebuah perusahaan komisaris independen memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan perusahaan. Komisaris independen ditunjuk untuk memperkuat kinerja dewan direksi dalam mengelola perusahaan. Komisaris independen yang semakin besar akan mendorong upaya perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon sebagai upaya perusahaan untuk memuaskan para pemangku kepentingan dan mendapatkan legitimasi (Oyewo, 2023).

Pengungkapan emisi karbon memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai peran perusahaan yang mereka kelola dalam mengurangi efek emisi gas rumah kaca. Pengungkapan informasi karbon merupakan respon perusahaan terhadap kebutuhan pemangku kepentingan akan informasi mengenai isu-isu lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon. Perusahaan mengungkapkan informasi strategis dan operasional melalui laporan tahunan, ESG, dan keberlanjutan untuk menunjukkan pemenuhan tanggung jawab pengurangan emisi karbon mereka. Selain itu, pengungkapan emisi karbon sangat penting untuk efisiensi operasi dan alokasi sumber daya perdagangan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon yang berkualitas tinggi dapat memitigasi asimetris informasi, sehingga meningkatkan nilai pengambilan keputusan dari informasi karbon (Liu & Jiayin, 2024).

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan Dewan Komisaris adalah Orang Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat pada direksi. Dewan komisaris juga berperan sebagai pengawas agar semua kepentingan *stakeholder* dapat terpenuhi berdasarkan asas kesetaraan.

Zada & Sari (2024) melakukan penelitian dengan judul Dampak mekanisme *Good Corporate Governance* Pada *Carbon emission disclosure*. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada

periode tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Purnayudha & Hadiprajitno (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan yang termasuk dalam indeks di BEI tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan *Carbon Intensive Industry* yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Wiransyah et al., (2024) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon dimoderasi kinerja lingkungan pada perusahaan sektor energi di BEI tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan emisi karbon masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga menimbulkan *research gap*.

Media *Exposure* merupakan bentuk pengungkapan kegiatan dan nilai-nilai positif perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga akan dinilai sebagai *good news* bagi investor dan publik. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat informasi dan memiliki nilai negatif perusahaan maka akan dinilai sebagai *bad news*. Hingga saat ini, media exposure masih terbilang cukup sedikit untuk menjadi suatu variabel dalam penelitian. (Febrianto et al., 2022).

Pengkomunikasian aktivitas perusahaan melalui media akan meningkatkan reputasi maupun *image* perusahaan dimata masyarakat luas, sehingga berdampak untuk penjualan perusahaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan (Situmorang & Yanti, 2020). Dengan adanya media *exposure* juga akan menaikkan visibilitas perusahaan yang menjadikan perusahaan sebagai objek pengawasan publik. Akibatnya apabila terdapat isu dan informasi negatif mengenai kondisi internal maupun eksternal perusahaan, akan dijadikan sebagai pertimbangan dan sinyal *valid* oleh investor untuk mengukur kualitas dan menetapkan keputusan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut (Asyari & Hernawati, 2023).

Media memiliki peran untuk mendorong perusahaan mempublikasikan kegiatannya dalam bidang lingkungan guna mendapatkan respon positif terhadap para *stakeholdernya*. Penelitian menurut Nastiti & Hardiningsih (2022) yang berjudul “Determinan Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan Manufaktur”. Menjelaskan Media berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, hal ini menunjukkan bahwa adanya media akan memberikan motivasi pada perusahaan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon dalam laporan tahunannya.

Penelitian lain oleh Septriyawati & Anisah (2019) dengan judul Pengaruh Media *Exposure*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Manufaktur, menjelaskan bahwa Media (*website*) merupakan salah satu sarana efektif yang mana didukung dengan pengguna yang semakin banyak sehingga membuat perusahaan semakin terdorong untuk melakukan pengungkapan sukarelanya dengan tujuan mendapat *legitimasi* masyarakat dan mendapat tanggapan positif oleh para *stakeholder* karena pada dasarnya perusahaan ada bukan hanya untuk kepentingan sendiri melainkan juga memberikan manfaat kepada para *stakeholder*.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti adalah *pertama*, penelitian Nastiti & Hardiningsih (2022) dengan judul Determasi pengungkapan emisi karbon. variabel yang dipakai oleh peneliti adalah kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan media *exposure* yang membedakan dengan penelitian Nastiti & Hardiningsih (2022) adalah variabel media *exposure* dijadikan sebagai variabel moderasi. *Kedua*, penelitian Purnayudha & Hadiprajitno (2022) dengan judul Pengaruh Karakteristik Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Peneliti mengambil satu variabel yaitu komisaris independen. Karena pada penelitian tersebut komisaris independent berpengaruh terhadap emisi karbon.

Dari fenomena dan GAP pada penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengungkapan emisi karbon yang ditinjau dari kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen. Maka judul penelitian ini adalah **“EVALUASI PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DENGAN VARIABEL MODERASI MEDIA EXPOSURE Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
4. Apakah media *exposure* dapat memoderasi hubungan antara kinerja keuangan terhadap pengungkapan emisi karbon?

5. Apakah media *exposure* dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon?
6. Apakah media *exposure* dapat memoderasi hubungan antara komisaris independen terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
4. Untuk mengetahui Apakah media *exposure* dapat memoderasi hubungan antara kinerja keuangan terhadap pengungkapan emisi karbon?
5. Untuk mengetahui Apakah media *exposure* dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon?
6. Untuk mengetahui Apakah media *exposure* dapat memoderasi hubungan antara komisaris independen terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak antara lain:

1. Bagi peneliti
Diharapkan penelitian ini berguna dalam mengembangkan dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon dan factor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Bagi calon investor
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika melakukan investasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa

efek Indonesia, guna melihat apakah perusahaan tersebut berada pada kondisi pengungkapan emisi karbon yang baik atau tidak.

3. Bagi perusahaan terutama manajemen

Peningkatan reputasi perusahaan yang aktif mengelola emisi karbon yang dapat menarik pelanggan, investor dan talenta yang peduli terhadap keberlanjutan serta dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tim manajemen dalam hal keberlanjutan dan praktik terbaik lingkungan dapat memberikan keuntungan strategis dan operasional bagi perusahaan.

4. Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, dan sebagai acuan dalam penelitian yang sama dimasa yang akan datang mengenai pengungkapan emisi karbon yang telah diteliti dalam penelitian ini.